

BAB V

PENUTUP

Bab ini memuat tiga bagian utama, yaitu simpulan, saran, dan uraian mengenai keterbatasan penelitian. Bagian simpulan disusun sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan, khususnya terkait bagaimana pengalaman sosialisasi KDRT di wilayah Semarang Timur yang dilaksanakan oleh DP3A Kota Semarang. Selanjutnya, bagian saran mencerminkan harapan Peneliti serta memberikan masukan yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian sejenis di masa mendatang. Adapun bagian keterbatasan menguraikan sejumlah aspek yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam kajian-kajian lanjutan di bidang Ilmu Komunikasi.

5.1 Simpulan

Pengalaman sosialisasi KDRT di wilayah Semarang Timur yang dilaksanakan oleh DP3A Kota Semarang menunjukkan ketimpangan dalam pelaksanaan program antara pengelola tingkat struktural dan pelaksana lapangan, yang tercermin dalam ketidakseimbangan kekuasaan dalam proses perencanaan dan evaluasi. Meskipun terdapat komitmen moral yang tinggi dan kesadaran kolektif di kalangan para pengelola program, perbedaan posisi dalam hierarki birokrasi memengaruhi sejauh mana suara para pelaksana lapangan didengar dan dihargai dalam pengambilan keputusan. Informan 1, sebagai pejabat struktural, sering kali lebih diterima dan dihormati oleh masyarakat, karena dianggap sebagai representasi institusi, sementara informan 2, 3, dan 4 yang berada di level staf lebih sering mengalami marginalisasi, bahkan ketika mereka memiliki pengetahuan praktis yang lebih

mendalam terkait kondisi lapangan. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun program dirancang secara partisipatif, relasi kuasa struktural tetap mendominasi, sehingga pengetahuan yang dihasilkan oleh pelaksana lapangan tidak selalu dianggap valid dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Ketimpangan ini diperburuk oleh struktur kontrol yang berbasis pada hierarki birokratis yang terlalu kaku. Meskipun kontrol dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti kontrol sederhana, teknologis, dan birokratis, pengelolaan tugas yang tidak merata menjadi masalah utama, di mana individu yang dianggap "serba bisa" sering menerima beban kerja lebih banyak. Kontrol ini juga tidak sepenuhnya menjangkau lapisan masyarakat, seperti yang terlihat dalam ketidaktercapaian program di beberapa wilayah, terutama wilayah dengan kasus KDRT yang tinggi seperti Kemijen. Selain itu, evaluasi dan monitoring yang tidak optimal disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun materiil, yang memperparah ketimpangan distribusi program, dan tidak semua lapisan masyarakat mendapatkan sosialisasi secara merata.

Dalam konteks sosial, struktur patriarki yang masih kuat di Semarang Timur memperburuk ketidakadilan yang dialami perempuan, yang sering kali terjebak dalam pola 'double burden', yakni beban ganda sebagai pekerja profesional sekaligus pengelola rumah tangga. Meskipun sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang KDRT, kenyataan bahwa perempuan masih menduduki posisi subordinat dalam struktur sosial memperlihatkan bahwa perubahan sosial yang diinginkan tidak cukup hanya dengan pendekatan informasi atau edukasi semata. Proses sosialisasi, yang idealnya memberikan ruang bagi

pemberdayaan masyarakat, masih dibatasi oleh struktur kuasa yang terpusat pada level tertentu.

Dari perspektif paradigma kritis, kesenjangan ini menggambarkan pentingnya redistribusi kuasa dalam struktur birokrasi, serta perlunya pembentukan mekanisme kontrol dan evaluasi yang lebih inklusif, yang dapat menampung suara-suara mereka yang berada di lapangan. Dengan demikian, untuk mencapai perubahan sosial yang berkelanjutan, program sosialisasi KDRT perlu melibatkan semua pihak secara setara dalam proses pengambilan keputusan, serta memperkuat mekanisme evaluasi berbasis partisipasi masyarakat agar program dapat lebih efektif menjangkau seluruh lapisan komunitas yang membutuhkan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap, dari perencanaan hingga evaluasi, akan memperbesar dampak program dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

1. Melakukan pengembangan lanjutan terhadap teori *Concertive Control* dengan menyesuaikannya pada konteks organisasi pemerintah yang memiliki struktur informal dan kekeluargaan. Fokus dapat diarahkan pada bagaimana kontrol nilai kolektif berpengaruh terhadap keadilan pembagian kerja dan efektivitas layanan publik.
2. Penelitian berikutnya dapat mengintegrasikan perspektif feminisme struktural dalam menganalisis ketimpangan kerja berbasis gender di instansi pemerintah, khususnya dalam isu kekerasan terhadap perempuan. Hal ini

penting untuk memahami hubungan antara beban ganda perempuan, kontrol organisasi, dan efektivitas sosialisasi program.

3. Perlu dilakukan pengamatan lebih lanjut mengenai praktik sosialisasi nilai di dalam instansi pemerintah, dengan menyoroti bagaimana internalisasi nilai dan norma organisasi berpengaruh terhadap kinerja, loyalitas, dan inovasi anggota tim dalam konteks kerja sosial.

5.2.2 Saran Praktis

1. Melakukan survei dan observasi lapangan secara berkala sebelum menyusun program sosialisasi KDRT. Langkah ini penting agar pemetaan kebutuhan masyarakat tidak hanya berdasarkan data sekunder, melainkan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.
2. Menyusun strategi pembagian tugas internal yang lebih adil dan proporsional agar anggota tim tidak mengalami beban kerja ganda. DP3A juga dapat mempertimbangkan pelatihan berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas SDM pendamping lapangan.
3. Mengembangkan pendekatan edukasi berbasis komunitas yang lebih partisipatif dengan melibatkan kelompok laki-laki dan institusi pendidikan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas target audiens dan memperkuat pencegahan kekerasan sejak dini.

5.2.3 Saran Sosial

1. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam evaluasi program sosialisasi melalui forum warga, diskusi komunitas, dan pelaporan berbasis digital. Hal

ini akan memperkuat transparansi, meningkatkan kepercayaan, serta membantu perbaikan program secara berkelanjutan.

2. Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi perempuan secara sistematis, seperti pelatihan kewirausahaan dan dukungan akses permodalan, khususnya di wilayah dengan angka kekerasan tinggi. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap pelaku dan menurunkan potensi kekerasan berulang.
3. Memperluas cakupan edukasi publik dengan memperbanyak kegiatan langsung di komunitas rentan, termasuk penggunaan media digital yang komunikatif. Langkah ini akan membantu meningkatkan literasi hukum masyarakat serta mengikis stigma terhadap korban KDRT.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan peneliti untuk mengonfirmasi secara mendalam mengenai efektivitas sosialisasi KDRT yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang melalui berbagai pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan tokoh komunitas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses dan waktu, serta keberagaman lokasi yang tersebar di wilayah Semarang Timur. Oleh karena itu, penelitian lebih banyak mengandalkan sudut pandang dari pihak DP3A sebagai pelaksana utama sosialisasi, sehingga perspektif dari mitra kerja dan masyarakat secara luas belum sepenuhnya terakomodasi.